



# RENCANA KERJA TAHUN 2023



## **DINAS PERHUBUNGAN PURWAKARTA**

JL Veteran No.1 Cisereuh Purwakarta


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu segera ditindaklanjuti dengan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, untuk mensinergikan program Perangkat Daerah dengan program regional dan sektoral serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta ini disusun sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2023 dengan mengacu kepada RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Purwakarta. Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Oleh karenanya sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta ini disampaikan terima kasih.

Purwakarta, 15 Juli 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM

NIP, 197202282003121003

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
<b>BAB II Evaluasi Renja</b>	5
2.1. Evaluasi Perlaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	5
Tabel. 2,1. Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan	6
Tabel T.C. 29 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Penapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d 2021	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
Tabel T.C. 30	19
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tuhas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
Tabel T.C. 3.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dishub Tahun 2021	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
Tabel. 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	31
<b>BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</b>	40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41

3.3	Program dan Kegiatan	41
	Tabel TC.3.3. Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	
<b>BAB IV</b>	<b>Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah</b>	59
	Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	60
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan

#### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
  12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah untuk menyajikan dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang aspiratif dengan skala prioritas untuk mendukung tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta.



Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. Sebagai upaya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penyenggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, meliputi:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaa Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisikan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022, meliputi :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan.

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

### **BAB V Penutup**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

### **DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2018 – 2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Terkait dengan Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan Tahun Anggaran 2023 telah selesai dilaksanakan diantaranya Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah Nomor 169 Tahun 2023, tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan

Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sampai dengan Bulan Desember 2021 dialokasikan sebesar 10.737.240.794,- dan terealisasi sebesar Rp 10.000.341.925,- (93,14%).

B. Belanja Langsung Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta menerima alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 12.913.518.035,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program 17 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja keuangan sebesar Rp.12.350.509.450,- (95,64%).

Tabel. 2.1.  
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
6	7	8	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.000.189.174</b>	<b>17.925.487.556</b>	<b>94,34 %</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>37.343.991</b>	<b>31.317.820</b>	<b>83,88 %</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	16.948,257	16.947.257	99,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perhubungan)	10.172.369	9.296.496	91,39 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	10.223.365	5.074.067	49,63
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.737.240.794</b>	<b>10.000.341.925</b>	<b>93,14%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan)	10.722.186.818	9.965.289.749	93,13%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perhubungan)	15.052.176	15.052.176	100 %
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.241.749</b>	<b>2.888.362</b>	<b>28,20%</b>

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Perhubungan)	10.241.749	2.888.362	28,20%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>271.188.540</b>	<b>269.505.000-</b>	<b>99,38%</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dinas Perhubungan)	271.188.540	269.505.000-	99,38%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.773,790.950</b>	<b>1.665.206.660</b>	<b>93,88%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perhubungan)	50.023.681	48.410.877	96,78%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan)	147.800.000	145.805.000	96,65%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Perhubungan)	54.576.725	39.216.104	71,85%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perhubungan)	475.756.019	405.455.929	85,85%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perhubungan)	100.058.525	10.057.650	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.200.000	19.200.000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Dinas Perhubungan)	99.701.000	84.374.100	84,63%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.950.000	22.715.000	96,96%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Perhubungan)	803.725.000	796.972.000	99,16%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>260.935.750</b>	<b>237.840.000</b>	<b>91,15%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan)	53.650.000	52.800.000	98,42%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.023.280.000</b>	<b>4.961.694.289</b>	<b>98,77%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perhubungan)	2.000.000	2.000.000	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan)	123.600.000	99.455.753	80,47%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perhubungan)	4.897.680.000	4.860.238.536	99,24%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>886.167.400</b>	<b>756.693.500</b>	<b>85,39%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perhubungan)	87.350.000	43.777.90	50,12%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perhubungan)	445.556.200	378.613.400	54,98%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan)	54.850.000	53.250.000	97,08%
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	99.841.200	88.050.800	88,19%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	198.570.000	193.001.400	97,20%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>4.578.792.842</b>	<b>4.366.363.819</b>	<b>95,32%</b>
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>479.079.221</b>	<b>401.437.832</b>	<b>83,79%</b>
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	335.052.926	288.926.468	86,23%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Dinas Perhubungan)	144.026.295	112.511.364	78,12%
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>562.028.952</b>	<b>498.772.606</b>	<b>88,75%</b>
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	409.490.069	446.422.063	84,60%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitasi Utama dan Pendukung)	102.523.214	102.335.034	99,82%
Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	50.015.669	50.015.509	100%
<b>Penerbitan Izin Penyeberangan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>75.167.661</b>	<b>72.909.081</b>	<b>97,00%</b>
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegritas secara Elektronik (Dinas Perhubungan)	50.096.331	46.346.331	98,50%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	25.071.330	23.562.750	93,98%
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.661.128.182</b>	<b>1.623.817.338</b>	<b>97,75%</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	1.191.682.148	1.116.256.936	97,87%
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	200.404.882	192.144.300	95,88%
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	195.302.155	191.677.155	98,14%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	73.738.997	73.738.997	100%
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.674.029.658</b>	<b>1.668.672.852</b>	<b>99,68%</b>

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	45.133.781	45.133.775	100%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	1.608.885.877	1.607.129.077	99,89%
Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	20.010.000	16.410.000	82,01%
<b>Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>50.310.315</b>	<b>50.310.315</b>	<b>100%</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Dinas Perhubungan)	50.310.315	50.310.315	100%
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan</b>	<b>24.999.310</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Peningkatan kapasitas Auditor dan Inspeksi LLAJ	24.999.310	0	0%
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.006.651</b>	<b>70.443.745</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50.006.894	45.444.000	90,88%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	24.999.757	24.909.745	100%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>100.001.200</b>	-	
<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</b>	<b>48.819.705</b>	<b>39.000.000</b>	<b>79,89%</b>
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	48.819.705	39.000.000	79,89%
<b>JUMLAH</b>	<b>23.650.758.829</b>	<b>22.350.851.375</b>	<b>94,50%</b>

Adapun program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari 3 program, 17 kegiatan dan 45 sub kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
  - b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
  - c. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
  - d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
  - e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
  - f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.
  - g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
  - h. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Pelayaran
  - a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi dari target capaian dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dan target kinerja pada Renstra baik dari target fisik maupun target keuangan sudah baik, sebagaimana dalam **Tabel 2.1** (Tabel.T-C.29 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017) berikut ini:

Tabel T.C. 29

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d 2021

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun(-2))	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)					
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2 15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>														
<b>2 15 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
<b>2 15 01 2 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>														
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	100%	10.000.000	100%	16.947.257	99.99%	100%		
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	100%	7.500.000	100%	9.296.496	91.39%	100%		
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	100%		100%	5.074.067	49.63%	100%		
<b>2 15 01 2 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jumlah gaji dan tunjangan ASN	100%	10.117.793.115	100%	9.985.289.749	93.13%	100%		
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	17.000.000	100%	15.052.176	100%	100%		





2	15	01	2	06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pada SKPD Jumlah menu/fitur sistem	100%		100%	796.972.000	99.16%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>									
2	15	01	2	07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%		100%	185.040.000	89.27%	100%		
2	15	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	100%		100%	52.800.000	98.42%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
2	15	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%		100%	2.000.000	100%	100%		
2	15	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	111.366.750	100%	99.455.753	80.47%	100%		
2	15	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji tenaga harian lepas, PTT, penjaga malam, pembantu penguji dan premi asuransi	100%	4.856.426.909	100%	4.860.238.536	99.24%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
2	15	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	100%		100%	43.777.900	50.12%	100%		
2	15	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya	100%		100%	378.613.400	84.98%	100%		

						dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan								
2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100%		100%	53.250.000	97.08%	100%		
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100%		100%	88.050.800	88.19%	100%		
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%		100%	193.001.400	97.20%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)</b>									
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>									
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100%	678.592.375	100%	288.926.468	86.23%	100%		
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	100%	149.520.300	100%	112.511.364	78.12%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Pengelola Terminal Penumpang Tipe C</b>									
2	15	02	2	03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C	100%		100%	346.422.063	84.60%	100%		
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Jumlah gedung terminal yang	100%	49.146.100	100%	102.335.034	99.82%	100%		

						(Fasilitas Utama dan Pendukung)	dipelihara								
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal Tipe C	100%		100%	50.015.509	100%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>04</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>									
2	15	02	2	04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor tersedia	100%		100%	49.346.331	98.50%	100%		
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelayanan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	100%		100%	23.562.750	93.98%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>									
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan uji KIR	100%		100%	1.166.256.936	97.87%	100%		
2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajin Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	100%		100%	192.144.300	95.88%	100%		
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Uji	Tersedianya bukti	100%		100%	191.677.155	98.14%	100%		

						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor								
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat uji kendaraan	100%		100%	73.738.997	100%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>									
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%		100%	45.133.775	100%	100%		
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	100%		100%	1.607.129.077	99.89%	100%		
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	100%	2.400.000	100%	16.410.000	82.01%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>									
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Andalalin	100%		100%	50.310.315	100%	100%		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>									
2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas audit dan inspektor	100%		100%	0	-	100%		

						LLAJ								
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								
2	15	02	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Program simaskot	100%		100%	45.444.000	90.88%	100%	
2	15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rasio fasilitas penerbitan izin trayek	100%		100%	24.999.745	100%	100%	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>03</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN</b>								
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>03</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								
2	15	03	2	07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	100%		100%	39.000.000	79.89%	100%	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 tentang Perincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan, yakni antara lain :

1. Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012;
2. Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
3. Pelayanan Izin Trayek (Kartu Pengawasan) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012.

Adapun prosedur persyaratan pelayanan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan pelayanan, baik administrasi maupun teknis.
- b. Biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
- c. Waktu penyelesaian pelayanan.
- d. Spesifikasi produk/pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.
- e. Prosedur pengajuan layanan yang harus diikuti oleh setiap pelanggan.
- f. Prosedur proses penyelesaian layanan.
- g. Kompetensi masing-masing petugas yang terlibat dalam proses.
- h. Sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan SOP.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagaimana terlampir.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama). Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada **Tabel 2.2** (Tabel.T-C.30 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017) berikut ini:



**Tabel T.C. 30**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

No.	Indikator	Target Renstra			Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	4	5	6	8	9	10	11
1.	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100	100	100	100	100	100	100
2.	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana/Prasarana Kantor	100	100	100	100	94,05	100	100
3.	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	75	100	100	100	94,81	100	100
5.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	100	100	100	100	100	100	100
7.	Jumlah Trayek Angkutan Umum	50	100	100	50	50	100	100
8.	Jumlah Armada Angkutan Umum	1.378	1.378	100	1.378	1.398	100	100
9.	Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	100	100	100	4	25	100	100
10.	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrail) pada Jalan Kabupaten	451	100	100	451	9,36	100	100
11.	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Direhabilitasi dan Terpelihara	100	100	100	2	30	100	100
12.	Persentase Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Sungai	100	100	100	62,2	134,92	100	100

	dan Penyeberangan							
13.	Persentase Angkutan Umum yang melakukan Uji KIR	100	100	100	126,51	134,92	100	100
14.	Jumlah Dokumen Lalu Lintas	100	100	100	100	100	100	100
15.	Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah	100	100	100	90	35	100	100
16.	Panjang Marka Jalan	100	100	100	428,45	1096	100	100
17.	Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu Lintas	100	100	100	100	100	100	100
18.	Persentase Layanan Angkutan Darat	100	100	100	62,2	62,2	100	100
19.	Jumlah Dokumen Lalu Lintas	100	100	100	100	100	100	100
20.	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	100	100	100	100	100	100	100
21.	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dikembangkan	100	100	100	100	100	100	100
22.	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	100	100	100	100	100	100	100

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan dan Kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
4. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana di atas, Dinas Perhubungan mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/ implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
3. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
4. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
5. Melakukan pembinaan kepada bawahan ;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dengan perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
7. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Setelah mencermati evaluasi kinerja Dinas Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya dan mencermati kondisi sekarang, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan utama yang dihadapi berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, antara lain :

1. Sumber Daya Aparatur Perhubungan yang belum maksimal secara kualitas dengan beban kerja;
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai termasuk gedung kantor dan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
3. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dan lalu lintas belum sesuai dengan kebutuhan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja disusun dalam rangka pemutahiran rencana kerja sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada tahun yang bersangkutan. Renja merupakan landasan operasional bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun proses tahapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### a. Persiapan Rancangan Rencana Kerja (Renja)

Pada tahap ini masing-masing bidang yang berada di lingkup Dinas Perhubungan dimintakan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan memperhatikan:

- Capaian sasaran hasil pada Renstra Dinas Perhubungan yang direncanakan pada tahun 2023.
- Penjabaran kegiatan dan sasaran output guna mencapai sasaran hasil (outcome).
- Hasil analisis prakiraan maju anggaran untuk mengetahui pagu indikatif bagi setiap program dan kegiatan.
- Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan dalam rangka mensinkronisasikan capaian sasaran, hasil/keluaran dan pagu indikatif.

### b. Rekapitulasi Usulan dari masing-masing Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Setelah masing-masing bidang selesai dalam merencanakan usulan kegiatan tahun 2022, maka usulan itu kemudian direkap sehingga menjadi satu kesatuan usulan konprehensif Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2023.

### c. Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021, dimana dalam forum ini bersama-sama dengan stakeholders (pemangku kepentingan) yang berada di Dinas Perhubungan membahas kegiatan-kegiatan dan usulan kegiatan pada tahun 2023. Tujuan forum ini adalah sebagai sarana komunikasi:

- untuk membahas rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan usulan dari masing-masing bidang.
- untuk mendapatkan satu pemahanan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi input/masukan dalam penyempurnaan rancangan renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta termasuk di dalamnya menentukan skala prioritas kegiatan dan lain-lain.

d. Penyusunan rancangan akhir Renja

Dari hasil kesepakatan dan komitmen pada forum tersebut di atas, maka disusun rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel T.C. 3.1**  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Tahun 2021  
Kabupaten Purwakarta

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD (RP. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD (RP. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. PWK</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>18.060.312.818</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. PWK</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>18.060.312.818</b>	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	29.759.900	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	29.759.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	10.790.426.753	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	10.790.426.753	
	Administrasi Barang	Kab.	Persentase	100%	10.450.950	Administrasi	Kab.	Persentase	100%	10.450.950	

	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PWK	tercapainya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PWK	tercapainya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100%	125.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100%	125.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	74.850.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	74.850.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah	100%	1.218.767.239	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. PWK	Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah	100%	1.218.767.239	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Kab. PWK	Proporsi tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	387.795.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Kab. PWK	Proporsi tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	387.795.000	
	Penyediaan Jasa	Kab.	Persentase	100%	5.041.212.976	Penyediaan Jasa	Kab.	Persentase	100%	5.041.212.976	



	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PWK	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PWK	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. PWK	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	382.050.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. PWK	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	382.050.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Kab. PWK</b>		<b>100%</b>	<b>2.470.311.480</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Kab. PWK</b>		<b>100%</b>	<b>2.470.311.480</b>	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	489.166.750	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	489.166.750	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. PWK	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	93.695.650	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. PWK	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	93.695.650	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	100%	130.030.100	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. PWK	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	100%	130.030.100	

			Penyelenggara n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Penyelenggara n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. PWK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100%	555.999.350	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. PWK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100%	555.999.350	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	896.485.950	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	896.485.950	
	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	99.999.600	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	99.999.600	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. PWK	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan	100%	74.996.120	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. PWK	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan	100%	74.996.120	

			Pemantauan Terminal					Pemantauan Terminal			
	Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	100.030.600	Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	100.030.600	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah laporan penerbitan penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	29.907.360	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. PWK	penerbitan penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	29.907.360	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Kab. PWK</b>		<b>100%</b>	<b>100.001.200</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Kab. PWK</b>		<b>100%</b>	<b>100.001.200</b>	
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. PWK	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.001.200	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan	Kab. PWK	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.001.200	

	dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota		
--	---------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Penelaahan ini dilakukan dari awal kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasi berdasarkan kewenangan. Untuk lebih jelasnya usulan tabel usulan program masyarakat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Purwakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				<b>22.239.752.638</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>18.555.878.638</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>50.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	10.000.000	APBD	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Terusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	10.000.000	APBD	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Terusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	10.000.000	APBD	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	10.000.000	APBD	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	APBD	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>10.886.122.243</b>	<b>APBD</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	100%	10.780.325.153	APBD	

		Purwakarta	ASN				
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	10.000.000	APBD	
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>10.450.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Tersusunnya Laporan Barang Milik	100%	<b>10.450.000</b>	APBD	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>275.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Retribusi Daerah	Kab. Purwakarta	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Retribusi Daerah	100%	200.000.000	APBD	
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian	100%	25.000.000	APBD	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	50.000.000	APBD	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.045.398.419</b>	<b>APBD</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	140.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	75.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	25.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	480.398.419	APBD	



2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	75.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	25.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	100%	25.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	100%	50.000.000	APBD	
2.15.01.2.06.11	Dikungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	50.000.000	APBD	
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>300.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Purwakarta	Tersedianya mebel	100%	100.000.000	APBD	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	200.000.000	APBD	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>5.063.907.976</b>	<b>APBD</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	2.000.000	APBD	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	150.000.000	APBD	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	4.911.907.976	APBD	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>					<b>APBD</b>	

	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>925.000.000</b>		
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	200.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	25.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	200.000.000	APBD	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2 Paket)	Kab. Purwakarta	Terpeliharanya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2 Paket)	100%	400.000.000	APBD	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				<b>3.533.874.000</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.15.02.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>				<b>200.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.02.2.02.02	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	200.000.000	APBD	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Purwakarta		100%	<b>533.874.000</b>	APBD	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	100%	200.000.000	APBD	

2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	183.874.000	APBD	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Purwakarta	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100%	150.000.000	APBD	
						APBD	
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>				<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kab. Purwakarta	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	100.000.000	APBD	
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>				<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	50.000.000	APBD	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	APBD	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kepadanaan Bermotor</b>				<b>250.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100%	-	APBD	

2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	200.000.000	APBD	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100%	50.000.000	APBD	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>1.775.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	APBD	
2.15.02.2.06.03	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Purwakarta	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	200.000.000	APBD	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	1.500.000.000	APBD	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	25.000.000	APBD	
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>125.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	75.000.000	APBD	

2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	100%	50.000.000	APBD	
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>				<b>250.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Kab. Purwakarta	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	50.000.000	APBD	
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	75.000.000	APBD	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100%	25.000.000	APBD	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	APBD	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100%	50.000.000	APBD	
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>200.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	150.000.000	APBD	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	Kab.	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	100%	50.000.000	APBD	

	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Purwakarta	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>				<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.03.04.	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelayaran Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>25.000.000</b>		
2.15.03.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		<b>25.000.000</b>		
<b>2.15.03.2.06</b>	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Kereta Api Kabupaten/Kota</b>				<b>55.000.000</b>	<b>APBD</b>	
2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	<b>55.000.000</b>	APBD	

2.15.03.2.13.	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</b>				<b>70.000.000</b>		
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	70.000.000	APBD	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun 2023. Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Penjabaran dari Tema Pembangunan tersebut dalam bentuk Prioritas Pembangunan. Pada Dokumen Rancangan RKP Tahun 2022, telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional, adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan**

Tujuan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yaitu Meningkatnya Sistem Jaringan Antar Konektivitas Perhubungan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk memperoleh hasil yang dilaksanakan oleh OPD ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai suatu sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang direncanakan untuk periode Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini:

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

##### **c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

**d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

- Analisa Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

**e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

### **a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.**

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

### **b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.**

- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

### **c. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.**

- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

### **d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.**

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### **e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.**

- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

### **f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

**g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.**

- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

**h. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

**i. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

**a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.**

- Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalm Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel TC.3.3  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Perogram / Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			100 %	<b>22.239.752.638</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>23.351.740.269</b>
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			100 %	<b>18.555.878.638</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>19.483.672.569</b>
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			100 %	<b>50.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>52.500.000</b>
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	10.500.000
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terusunnya Dokumen RKA-SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	10.500.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	10.500.000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan	Tersusunnya	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	10.500.000
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>10.886.122.243</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>11.530.428.355</b>
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Pwk	100 %	10.780.325.153	APBD		100 %	11.319.341.410
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pwk	100 %	10.000.000	APBD		100 %	10.500.000
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>10.450.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>10.972.500</b>
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik	Pwk	100 %	<b>10.450.000</b>	APBD		100 %	10.972.500
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>275.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>288.750.000</b>
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Retribusi Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Retribusi Daerah	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	26.250.000

2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.045.398.419</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>1.097.668.339</b>
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pwk	100 %	140.000.000	APBD		100 %	147.000.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	78.750.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	26.250.000
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Pwk	100 %	480.398.419	APBD		100 %	504.418.339
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	78.750.000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	26.250.000
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	26.250.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	105.000.000



		SKPD							
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000
2.15.01.2.06.11	Dikungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>300.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>315.000.000</b>
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	105.000.000
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>5.063.907.976</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>5.317.103.374</b>
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Pwk	100 %	2.000.000	APBD		100 %	2.100.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pwk	100 %	150.000.000	APBD		100 %	157.500.000
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pwk	100 %	4.911.907.976	APBD		100 %	5.157.503.374
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>925.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>971.250.000</b>

	<b>Daerah</b>								
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	105.000.000
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	26.250.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2 Paket)	Terpeliharanya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2 Paket)	Pwk	100 %	400.000.000	APBD		100 %	420.000.000
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>				<b>3.533.874.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>3.710.567.700</b>

	<b>LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>								
<b>2.15.02.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>				<b>200.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>210.000.000</b>
2.15.02.2.02.02	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>533.874.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>560.567.000</b>
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pwk	100 %	183.874.000	APBD		100 %	193.067.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Pwk	100 %	150.000.000	APBD		100 %	157.500.000
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal</b>				<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>105.000.000</b>

	<b>Penumpang Tipe C</b>								
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pwk	100 %	100.000.000	APBD		100 %	105.000.000
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>				<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>105.000.000</b>
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000

<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kepadaraan Bermotor</b>				<b>250.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>262.500.000</b>
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Pwk	100 %	-	APBD		100 %	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>1.775.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>1.863.750.000</b>
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000
2.15.02.2.06.03	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan	Pwk	100 %	200.000.000	APBD		100 %	210.000.000

	rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas							
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	1.500.000.000	APBD		100 %	1.575.000.000
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	26.250.000
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>125.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>131.250.000</b>
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	78.750.000
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000

<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>				<b>250.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>262.500.000</b>
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pwk	100 %	75.000.000	APBD		100 %	78.750.000
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	26.250.000
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaranaan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000

		Perusahaan Angkutan Umum							
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>200.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>210.000.000</b>
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pwk	100 %	150.000.000	APBD		100 %	157.500.000
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pwk	100 %	50.000.000	APBD		100 %	52.500.000
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>				<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>157.500.000</b>
2.15.03.04.	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelayaran Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam Daerah</b>				<b>25.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>26.250.000</b>



	<b>Kabupaten/Kota</b>								
2.15.03.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pwk	100 %	25.000.000	APBD		100 %	26.250.000
<b>2.15.03.2.06</b>	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Kereta Api Kabupaten/Kota</b>				<b>55.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>57.750.000</b>
2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan	Pwk	100 %	<b>55.000.000</b>	APBD		100 %	57.750.000

	Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2.15.03.2.13.	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</b>				<b>70.000.000</b>	APBD		100 %	73.500.000
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pwk		70.000.000	APBD		100 %	73.500.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta 2018-2023 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024 akan disampaikan dalam **Tabel 4.1** sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Purwakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				<b>22.239.752.638</b>	<b>APBD</b>			<b>23.351.740.269</b>
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>18.555.878.638</b>	<b>APBD</b>			<b>19.483.672.569</b>
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>50.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>52.500.000</b>
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pwk	100	10.000.000	APBD		100	10.500.000
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terusunnya Dokumen RKA-SKPD	Pwk	100	10.000.000	APBD		100	10.500.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pwk	100	10.000.000	APBD		100	10.500.000

2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pwk	100	10.000.000	APBD		100	10.500.000
2.15.01.2.01.07	Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Pwk	100	10.000.000	APBD		100	10.500.000
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>10.886.122.243</b>	<b>APBD</b>			<b>11.530.428.355</b>
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Pwk	100	10.780.325.153	APBD		100	11.319.341.410
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pwk	100	10.000.000	APBD		100	10.500.000
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>10.450.000</b>	<b>APBD</b>			<b>10.972.500</b>
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik	Pwk	100	<b>10.450.000</b>	APBD		100	10.972.500
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>275.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>288.750.000</b>
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Retribusi Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Retribusi Daerah	Pwk	100	200.000.000	APBD		100	210.000.000
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian	Pwk	100	25.000.000	APBD		100	26.250.000
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000

		Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi							
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Pwk		<b>1.045.398.419</b>	<b>APBD</b>			<b>1.097.668.339</b>
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pwk	100	140.000.000	APBD		100	147.000.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pwk	100	75.000.000	APBD		100	78.750.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Pwk	100	25.000.000	APBD		100	26.250.000
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Pwk	100	480.398.419	APBD		100	504.418.339
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Pwk	100	75.000.000	APBD		100	78.750.000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pwk	100	25.000.000	APBD		100	26.250.000
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Pwk	100	25.000.000	APBD		100	26.250.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pwk	100	100.000.000	APBD		100	105.000.000

2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah</b>		Pwk		<b>300.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>315.000.000</b>
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Pwk	100	100.000.000	APBD		100	105.000.000
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	100	200.000.000	APBD		100	210.000.000
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Pwk		<b>5.063.907.976</b>	<b>APBD</b>			<b>5.317.103.374</b>
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Pwk	100	2.000.000	APBD		100	2.100.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pwk	100	150.000.000	APBD		100	157.500.000
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pwk	100	4.911.907.976	APBD		100	5.157.503.374
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>925.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>971.250.000</b>
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan	Pwk	100	100.000.000	APBD		100	105.000.000

	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pwk	100	200.000.000	APBD		100	210.000.000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pwk	100	25.000.000	APBD		100	26.250.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pwk	100	200.000.000	APBD		100	210.000.000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2 Paket)	Terpeliharanya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2 Paket)	Pwk	100	400.000.000	APBD		100	420.000.000
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				<b>3.533.874.000</b>	<b>APBD</b>			<b>3.710.567.700</b>
<b>2.15.02.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>				<b>200.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>210.000.000</b>
2.15.02.2.02.02	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan	Pwk	100	200.000.000	APBD		100	210.000.000



		Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Pwk</b>	<b>100</b>	<b>533.874.000</b>			<b>100</b>	<b>560.567.000</b>
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pwk	100	200.000.000	APBD		100	210.000.000
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pwk	100	183.874.000	APBD		100	193.067.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Pwk	100	150.000.000	APBD		100	157.500.000
						APBD			
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>				<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>105.000.000</b>
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pwk	100	100.000.000	APBD		100	105.000.000
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>				<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>105.000.000</b>
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan	Jumlah Dokumen	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000

	Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kepadatan Bermotor</b>				<b>250.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>262.500.000</b>
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Pwk	100	-	APBD		100	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan	Pwk	100	200.000.000	APBD		100	210.000.000

		Bermotor							
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>1.775.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>1.863.750.000</b>
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000
2.15.02.2.06.03	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pwk	100	200.000.000	APBD		100	210.000.000
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100	1.500.000.000	APBD		100	1.575.000.000

2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pwk	100	25.000.000	APBD		100	26.250.000
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>		Pwk		<b>125.000.000</b>	<b>APBD</b>			131.250.000
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Pwk	100	75.000.000	APBD		100	78.750.000
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		Pwk		<b>250.000.000</b>	<b>APBD</b>			262.500.000
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pwk	100	75.000.000	APBD		100	78.750.000
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	Pwk	100	25.000.000	APBD		100	26.250.000

		Terminal							
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audir dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaranaan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>200.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>210.000.000</b>
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pwk	100	150.000.000	APBD		100	157.500.000
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan	Pwk	100	50.000.000	APBD		100	52.500.000

	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>				<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>157.500.000</b>
2.15.03.04.	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelayaran Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>25.000.000</b>				26.250.000
2.15.03.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			<b>25.000.000</b>				26.250.000

2.15.03.2.06	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Kereta Api Kabupaten/Kota</b>				55.000.000	APBD			57.750.000
2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pwk	100	55.000.000	APBD		100	57.750.000
2.15.03.2.13.	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</b>			100	70.000.000				73.500.000
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan	Pwk	100	70.000.000	APBD		100	73.500.0000

		Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau							
--	--	------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



## **BAB V**

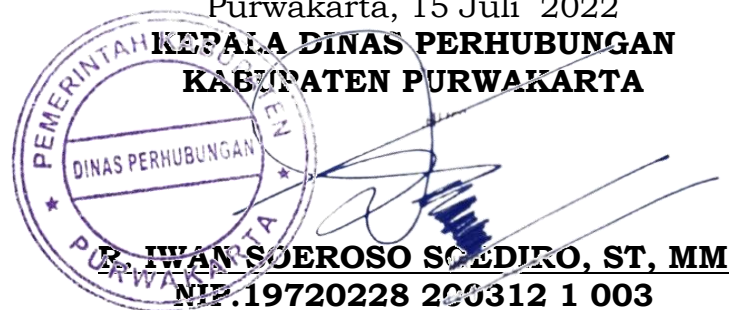
### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan (Kinerja) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dan mencakup usulan dari masing-masing stakeholder yang ada di Dinas Perhubungan tahun 2023.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Purwakarta itu sendiri dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Purwakarta, 15 Juli 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**B. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST, MM**  
**NIP.19720228 200312 1 003**

